

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui perspektif kebijakan publik. Penulis mengambil daerah penelitian UMKM di Kabupaten Probolinggo dikarenakan potensinya yang cukup potensial di Propinsi Jawa Timur. Oleh karenanya, faktor kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo terhadap pelaku UMKM, yakni formulasi kebijakan dalam pemberdayaan pelaku UMKM, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi formulasi kebijakan tersebut, serta interaksi antar aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo akan disoroti dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait pemberdayaan pelaku UMKM dilakukan dengan menggunakan model sistem melalui pendekatan *bottom up* atau dengan melalui jaring aspirasi masyarakat. Hal ini, sesuai dengan teori negara kesejahteraan (*welfare state*) dimana pemerintah dituntut tanggung jawabnya untuk menjamin kesejahteraan warganya. Faktor pendukung dan penghambat seperti permodalan dan teknologi serta dukungan pemerintah menjadi bahan pertimbangan dalam formulasi kebijakan tersebut. Interaksi antara pemerintah kabupaten dan masyarakat serta interaksi antara pemerintah kabupaten dan DPRD pada formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo lebih mencerminkan proses interaksi dalam bentuk partisipatif dan asosiatif. Hal ini sesuai dengan teori sistem David Easton dimana dalam formulasi kebijakan terdapat interaksi yang terbuka dan dinamis antar para pembuat kebijakan dengan lingkungannya.

Kata Kunci: Kebijakan, Formulasi Kebijakan, Pemberdayaan UMKM

ABSTRACT

This study examines the formulation of government policy in the empowerment of actors Probolinggo Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) through a public policy perspective. The author took the SMEs in the study area because of its potential Probolinggo considerable potential in East Java Province. Therefore, the factors of government policy towards SMEs Probolinggo, namely policy formulation in the empowerment of SMEs, the factors that influence the policy formulation, as well as the interactions between actors involved in policy formulation related to the empowerment of SMEs in Probolinggo will be highlighted in this study. This study used a descriptive method with qualitative data. Data obtained from interviews and documentation studies. Based on the research results, it can be concluded that the formulation of government policy related to the empowerment of Probolinggo SMEs carried out by using a model of the system through a bottom up approach through the net or the aspirations of the people. This, according to the theory of the welfare state in which the government has the responsibility to ensure the welfare of its citizens. Enabling and inhibiting factors such as capital and technology as well as government support to be considered in the formulation of the policy. The interaction between the district and the community as well as the interaction between the district and the Council on the policy formulation related to the empowerment of SMEs in Probolinggo better reflect the interaction process in the form of participatory and associative. This is consistent with the theory of David Easton system where the policy formulation contained an open and dynamic interaction between policy-makers with the environment.

Keywords : Policy, Policy formulation, empowerment of actors SMEs